



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Implikasi Runtuhnya Rezim Siad Barre terhadap Konflik
di Somalia**

Skripsi

Oleh

Hani Indita Fajarianti

2016330181

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Hani Indita Fajarianti
Nomor Pokok : 2016330181
Judul : Implikasi Runtuhnya Rezim Siad Barre terhadap Konflik di Somalia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 12 Desember 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. I Nyoman Sudira

: 

Sekretaris
Giandi Kartasmita, S.IP, M.A.

: 

Anggota
Idil Syawfi, S.IP, M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hani Indita Fajarianti

NPM : 201633181

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Implikasi Runtuhnya Rezim Siad Barre terhadap Konflik di Somalia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Januari 2020



HANI INDITA F.

Hani Indita Fajarianti

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena atas izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. Penelitian ini membahas mengenai implikasi yang ditimbulkan akibat runtuhnya rezim Siad Barre pada tahun 1991 terhadap konflik di Somalia. Sejak kepergian Siad Barre, Somalia kehilangan fungsi pemerintah yang kemudian menyebabkan aktor-aktor di Somalia saling memperebutkan posisi dalam kursi pemerintah. Hilangnya tatanan hukum membuat masyarakat Somalia memilih untuk menjadi panglima perang atau membentuk kelompok berbasis identitas sebagai mekanisme bertahan hidup. Salah satu instrumen berbahaya di Somalia ialah *Islamic Courts Union* (ICU) yang kemudian bertransformasi menjadi organisasi terorisme di Tanduk Afrika, Al-Shabaab. Sehingga, perang sipil yang terjadi di Somalia merupakan konsekuensi dari kegagalan rezim di tahun 1991. Penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun untuk membuat penelitian ini menjadi lebih baik.

Bandung, 7 Januari 2020

Hani Indita Fajarianti

ABSTRAK

Nama: Hani Indita Fajarianti
NPM: 2016330181
Judul: Implikasi Jatuhnya Rezim Siad Barre terhadap konflik di Somalia

Penelitian ini bertujuan untuk membahas implikasi yang ditimbulkan dari runtuhnya rezim Siad Barre terhadap konflik di Somalia dengan menyorot pada perang sipil yang pecah di tahun 2006 dan 2009. Hal ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terus terjadi di antara masyarakat Somalia dikarenakan tidak berfungsinya peran pemerintah. Penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan *Protracted Social Conflict Theory* (PSCT) yang diusung oleh Edward Azar sebagai pisau analisa. Adapun implikasi runtuhnya rezim Siad Barre terhadap konflik di Somalia ialah pelanggaran konflik yang berbasis identitas. Hal tersebut didasari atas kekosongan pemerintah yang membuat masyarakat Somalia menyediakan keamanan, yang seharusnya disediakan oleh pemerintah, secara independen. Pada akhirnya, Somalia tetap menjadi ladang konflik berkepanjangan sejak kekosongan pemerintah di tahun 1991.

Kata kunci: Somalia, Perang Sipil di Somalia, *Protracted Social Conflict Theory*

ABSTRACT

Name: Hanı Indita Fajarianti

NPM: 2016330181

Title: *The Collapse of Siad Barre's Regime and its Implications towards the Conflict in Somalia*

This research aims to examine the implications of the state collapse in Somalia towards the conflict within, which highlights the civil war that broke out in 2006 and 2009. This is due to the conflict that constantly occurs between the Somalis as the role of state and authorities was defuncted at that time. With applying a qualitative research method and using Protracted Social Conflict Theory (PSCT) by Edward Azar, this research manages to answer the research question. The consequence from the downfall of Siad Barre regime is the prolonged identity-based conflict in Somalia. This is build upon the power vacuum that took place which persuaded civilians to provide security of their own, when it should have been fulfilled through the role of state authority. Eventually, Somalia transformed into a field of protracted social conflict since 1991.

Keywords: Somalia, Somalia Civil War, Protracted Social Conflict Theory

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Allah SWT,

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas izin, kehendak, dan kemudahan yang diberikan-Nya selama proses penulisan.

Kepada Mama, Bapak, Bang Arief, dan Rafif,

Untuk segala doa, dukungan, dan kepercayaan yang tiada henti dihaturkan untuk Hani yang jauh di Bandung. *You are all very loved!*

Kepada Mas Giandi dan Mbak Vrames,

Untuk segala arahan, masukan, cerita, maupun canda tawa selama 6 bulan kebelakang. Terima kasih, Mas Gi dan Mbak Vrames!

Kepada Aretta Ananda, Ezra Reyhan, dan Nydia Anjani,

Orang-orang baik. Terima kasih untuk waktu, cerita, dukungan, *inside jokes*, dan segala suka duka yang telah dilalui bersama sejak tahun pertama kuliah. *Rumour has it that I couldn't survive uni without you.*

Kepada Priscilla Puspita dan Sarita Sekar Laras,

Kedua teman yang selalu menemani dalam proses penulisan skripsi, terima kasih untuk pertemuan-pertemuan produktif, kamus berjalan, gelas-gelas kopi, hingga *strawberry Australia!*

Kepada Delegasi Perancis *Diplomacy in Practice 2019*,

Teruntuk Anselma Ambar, Aretta Ananda, Aryanne Regita, Claireina Diana, Ezraella Meirani, Nadila Chrysanti, Nydia Anjani, Priscilla Puspita, Sarita Sekar Laras, dan Sherin Julianne; selamat telah melewati segala rangkaian prakdip dengan gaya! Akan kangen dengan kerempongan kalian semua. Salam *liberte egalite fraternite, flower power*, dan *la vie en rose!*

Kepada Achram Harveliono Bay, Nindyo Setiawan dan Niqa Hauna,

Senang rasanya bisa dipertemukan oleh tiga kakak yang selalu sedia membantu tanpa pamrih. Terima kasih, Ivel, Nindy, dan Nicca!

Kepada DOCS Fisip Unpar,

Adalah suatu kebanggaan bisa berprogres bersama orang-orang hebat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam perhelatan ini. *Gak* nyangka bisa memproduksi tiga film pendek di sela-sela hari perkuliahan. Terima kasih sebesar-besarnya untuk keluarga WatchDOCS, UnderDOCS, dan MonDOCS!

Kepada Affi Naro, Amanda Shafira, Andanareswari, Annisa Sadanoer, Rangga Cesario, Cahyadi Tampake, Clarissa Jane, Gabrielle Angel, Hendry Samuel Pangaribuan, Jessica Viani Kurniawan, Jhon Geofany, Marika Ganisti, Mahira Kanya, Nabila Aulia, Rayvindira Athena, Refsy Remas Nurhabi, Richard Theo, Shania Marcella Kowaas, Shella Lodra, Sunjoyo Jatmiko, Syifa Maisyura, dan Yohanes Amadeus,

Terima kasih telah mengukir cerita saya di Kampus Tiga! Bandung *gak* akan terasa apa-apa kalau bukan karena kalian. Semoga garis kehidupan kita bisa bersinggungan lagi di lain tempat!

Kepada Ghina Amalia Syifani, Thalita Kara dan Tiana Sabrina,

Tiga orang yang selalu menemani perjalanan *fangirling* saya, pada saat yang bersamaan juga menjadi teman terbaik yang senantiasa memberikan dukungan dari jauh. *Hoping for us to see Bangtan together someday!*

Kepada Adinda Permata Putri, Dimas Abimanyu Wicaksono, Fauzan Rahman, Haroemi Oktaviani, Karin Paula, Luthfan Krishaba, Naurah Padmasedhana, Raditya Rizqullah, dan Yudia Dwiananda,

Terima kasih sudah *stay* meskipun telah melihat kebobrokan saya sejak SMA. Terima kasih untuk sumbangan tawa dan seluruh Bakso Bang Jali, ataupun Pempek dan Tekwan Mamyang. Jangan lupa cuci piring!

Kepada Nadya Milyandita, Nadine Herdwita, Nadija Herdwina, Nadiya Shafira, Prita Eriani, Jorgie Muhammad, Kevin Yokoi, dan Rifqi Ilyasa,

Terima kasih atas kesetiiaannya karena telah menjadi tempat tukar cerita sejak 2013!

Kepada Muhammad Rizky Yudha,

Terima kasih telah menjadi tempat pulang terhangat di antara tempat-tempat pulang lainnya. Terima kasih yang sebesar-besarnya, Yudha!

Kepada Bandung,

Rumah kedua yang tiap sudutnya telah mewarnai kehidupan saya selama kuliah.

Terima kasih, 022!

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.2.1. Perumusan Masalah	6
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7

1.3.2. Kegunaan Penelitian	7
1.4. Kajian Literatur	7
1.5. Kerangka Pemikiran	12
1.6. Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	20
1.6.1. Metoda Penelitian	20
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7. Sistematika Pembahasan	22
BAB II.....	24
SOMALIA SEBAGAI <i>COLLAPSED STATE</i>.....	24
2.1. Kondisi Somalia sebagai <i>Collapsed State</i>	24
2.1.1. Kilas Balik Rezim Siad Barre	25
2.1.2. Perebutan Kekuasaan saat Kekosongan Otoritas	35
2.1.3. Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Somalia 1992-1995	37
2.1.4. Upaya Rekonsiliasi dan Kelahiran <i>Islamic Court Union</i>	39
BAB III.....	42
KONFLIK BERKEPANJANGAN DI SOMALIA	42
3.1. Perang Sipil Somalia 1 (2006-2009)	43
3.2. Perang Sipil Somalia 2 (2009-2012)	47
3.3. Konflik sosial berkepanjangan di Somalia	51
3.3.1. Pre-kondisi konflik berkepanjangan di Somalia	51

3.3.1.1. Komposisi masyarakat Somalia yang beragam.....	51
3.3.1.2. Pengungkapan kekecewaan secara kolektif.....	56
3.3.1.3. Pemerintah Somalia yang rapuh.....	59
3.3.1.4. Faktor eksternal yang mempengaruhi konflik.....	63
3.3.2. Dinamika proses konflik.....	67
3.3.2.1. Strategi dan aksi komunal.....	67
3.3.2.2. Strategi dan aksi negara.....	72
3.3.2.3. Mekanisme bawaan dari konflik.....	75
3.3.3. Hasil yang ditimbulkan dari konflik.....	76
3.3.3.1. Kemunduran terhadap keamanan fisik.....	77
3.3.3.2. Kerusakan institusi.....	84
3.3.3.3. <i>Psychological ossification</i>	85
3.3.3.4. Peningkatan ketergantungan dan <i>cliency</i>	86
3.4. Pemetaan aktor konflik di Somalia.....	88
BAB IV	97
KESIMPULAN	97
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1: Pemetaan kelompok klan di Somalia	52
Gambar 3. 2: Pengaruh ICU di Somalia	70
Gambar 3. 3: Pemetaan aktor di Somalia	89
Gambar 3. 4: Pemetaan aktor konflik di Somalia berdasarkan bentuk gerakan. ..	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1: Angka terrorisme di Somalia (dalam persen).	79
Grafik 3. 2: Total pengungsi Somalia di Djibouti, Ethiopia, Kenya, dan Yemen. 80	
Grafik 3. 3: Total <i>Internally Displaced Persons</i> (IDPs) di Somalia.	81
Grafik 3. 4: Ekspor Somalia (dalam juta Dollar AS).	82
Grafik 3. 5: Defisit perdagangan Somalia (dalam juta Dollar AS).	83
Grafik 3. 6: Alur bantuan luar negeri ke Somalia oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Norwegia, sebagai badan donor terbesar kepada Somalia.	86
Grafik 3. 7: Alur bantuan luar negeri ke Somalia (dalam juta Dollar AS).	87
Grafik 3. 8: Pemetaan aktor di Somalia	89
Grafik 3. 9: Pemetaan aktor konflik di Somalia berdasarkan bentuk gerakan.	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Aktor konflik di Somalia serta kepentingan dan objektifnya. 90

DAFTAR SINGKATAN

AIAI	Al-Itihaad Al-Islamiya
AMISOM	African Union Mission to Somalia
ARPCT	Alliance for the Restoration of Peace and Counter-Terrorism
ARS	Alliance for Re-liberation of Somalia
ARS-A	ARS-Asmara
ARS-D	ARS-Djibouti
AU-PSC	African Union Peace and Security Council
BBC	British Broadcasting Corporation
CSIS	Center for Strategic and International Studies
ENDF	Ethiopian National Defense Forces
ICRC	International Committee of the Red Cross
ICU	Islamic Courts Union
IDP	Internally Displaced Person
IGAD	Intergovernmental Authority on Development
ISS	Institute for Security Studies
NSS	National Security Service

SRRC	Somalia Reconciliation and Restoration Council
PSCT	Protracted Social Conflict Theory
PSC	Protracted Social Conflict
SODAF	Somali Democratic Action Front
SNA	Somali National Alliance
SNM	Somali National Movement
SNPC	Somalia National Peace Conference
SSDF	Somali Salvation Democratic Front
SSF	Somali Salvation Front
TFG	Transitional Federal Government
TFI	Transitional Federal Institution
TNG	Transitional National Government
USC	United Somali Congress
UNOSOM	United Nations Operation in Somalia
UNITAF	United Task Force

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak mendapat kemerdekaannya, Somalia mengalami konflik antar klan yang sebagian besar didasari atas perjuangan supremasi di Somalia. Secara historis, Somalia terdiri dari berbagai klan yang kemudian terbagi kembali menjadi sub-klan dan sub-subklan. Adapun klan yang termasuk ke dalam kelompok mayoritas ialah Darood, Hawiye, Digil-Rahanweyn, Dir, dan Isaaq yang merupakan klan dengan populasi terbesar. Sementara Bantu, Barawans dan Bajuni merupakan kelompok klan minoritas¹. Ketegangan antar klan diperburuk saat kudeta militer yang menyebabkan terbunuhnya Abdirashid Ali Shermaake, Presiden Somalia pada tahun 1969, yang posisinya kemudian digantikan oleh Mohammed Siad Barre². Rezim pemerintahan Somalia pun bergeser menjadi *party centralist* dengan peran militer yang relatif signifikan.

Kepemimpinan Siad Barre menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan rakyat Somalia terhadap Siad Barre yang kemudian menjadi benih kelahiran gerakan-gerakan nasionalis, seperti *Somali Salvation Democratic Front* (SSDF)

¹ World Bank, *Conflict in Somalia : drivers and dynamics (English)*, (Washington DC: World Bank, 2005), hlm 5
<http://documents.worldbank.org/curated/en/537531468335694025/Conflict-in-Somalia-drivers-and-dynamics>

² Brian Hesse, *Somalia: State Collapse, Terrorism and Piracy*, (Oxford: Routledge, 2011), hlm 5

dan *Somalia National Movement* (SNM) yang bertujuan untuk melawan rezim Siad Barre pada tahun 1981³. Perang sipil antara kelompok pemberontak dan pemerintah dimulai pada tahun 1988 yang kemudian berakhir pada kepergian Siad Barre dari Somalia pada tahun 1991. Tidak lama setelah itu, Somaliland dan Puntland memisahkan diri dari Somalia dan secara *de facto* mendeklarasikan kemerdekaannya⁴.

Runtuhnya otoritas pemerintah Somalia menyebabkan situasi yang tidak terkendali. Terjadi peningkatan kompleksitas masalah di Somalia seperti konflik kekuasaan antara Ali Mahdi Muhammad dan Jendral Farah Aideed di Mogadishu tahun 1991 yang menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur di Somalia. Kenihilan legitimasi di Somalia menimbulkan hadirnya *Islamic Courts Union* (ICU) yang ingin membangun Somalia berlandaskan hukum Islam Syariah. Meskipun proses rekonstruksi pemerintah telah dilaksanakan, masih banyak konstituen masyarakat yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintah transisi. Hal tersebut kerap melanggengkan konflik di Somalia.

Perseteraan atas kekuasaan membuat masyarakat Somalia pergi meninggalkan daerah berkonflik yang kemudian menghasilkan dua juta pengungsi di Kenya dan Ethiopia. Kekeringan, kelaparan, ditambah konflik yang sedang

³ World Bank, *Conflict in Somalia : drivers and dynamics (English)*, (Washington DC: World Bank, 2005), hlm 5

<http://documents.worldbank.org/curated/en/537531468335694025/Conflict-in-Somalia-drivers-and-dynamics>

⁴ Christopher Paul, Colin P. Clarke, Chad C. Serena, "Somalia (1991–2010)," di *Mexico Is Not Colombia: Alternative Historical Analogies for Responding to the Challenge of Violent Drug-Trafficking Organizations, Supporting Case Studies*, (Washington DC: 2014), hlm 156 https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR548z1/RAND_RR548z1.pdf

terjadi menimbulkan kematian hingga 280,000 jiwa.⁵ Aktor-aktor pihak berkonflik berubah-ubah sejak runtuhnya rezim tahun 1991. Meskipun, proses resolusi konflik terus dilakukan, Somalia tetap rentan untuk terekspos terhadap konflik.

1.2 Identifikasi Masalah

Sejak tahun 1991, Somalia diklasifikasikan sebagai *collapsed state* karena otoritas pemerintahan Somalia yang tidak diakui lagi.⁶ Disebutkan bahwa kondisi yang terjadi saat setelah negara runtuh ialah,

“...substate actors took over, as they always do when the prime polity disappears. Those warlords, or sub-state actors, gained control over regions and subregions within what had been a nation-state, built up their own local security apparatuses and mechanisms, sanctioned markets and other trading arrangements, and even established an attenuated form of international relations.”⁷

Bercermin dengan kondisi di Somalia, nyatanya hadir beberapa panglima perang, kelompok milisi, dan pada akhirnya kelompok ekstrimis, setelah ketiadaan otoritas di Somalia.

Pasca kekosongan pemerintah, terdapat sebuah mahkamah yang mengacu kepada hukum Islam Syariah bernama *Islamic Courts Union (ICU)*. Awalnya, mahkamah ini berinisiatif untuk menegakkan keamanan di Somalia dengan memerangi instrumen masyarakat yang mengancam stabilitas Somalia, termasuk

⁵ Kenneth Menkhaus, *Somalia: A Situation Analysis*, United Nations High Commissioner for Refugees, (November 2000), hlm 6

⁶ Ioan Lewis, *Understanding Somalia and Somaliland: a guide to cultural history and social institutions*, (London: Hurst, 2008), hlm 125-126

⁷ Robert I. Rotberg, *When States Fail: causes and consequences*, (Oxford: Princeton University Press, 2004), hlm 10

menyediakan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Melihat adanya keberhasilan dari tujuan tersebut, ICU merasakan adanya signifikansi peran yang dapat mereka ambil di Somalia dengan memperkuat kekuasaan dan kepemilikan sumber daya bukan berdasarkan garis klan, tetapi hukum-hukum Islam.⁸

Pada akhirnya, kekuatan ICU dikecam sebagai kekuatan ekstrimis di Somalia yang memunculkan kekhawatiran dari Ethiopia. Meles Zenawi, Perdana Menteri Ethiopia, menyatakan bahwa gejolak politik yang terjadi di Somalia merupakan ancaman yang dikhawatirkan dapat mengancam perbatasan negara-negara Tanduk Afrika. Hal tersebut mendasari campur tangan pasukan Ethiopia ke Somalia untuk menangkal serta memberantas pengaruh gerakan-gerakan esktrimis⁹.

Konflik pun pecah, peristiwa ini dikenal dengan Perang Sipil 1 di Somalia yang terjadi antara ICU dan *Transitional Federal Government* (TFG) yang dibantu oleh *Ethiopian National Defense Force* (ENDF). Pada tahun 2006, Somalia menjadi ladang konflik yang mematikan karena kekerasan yang tidak dapat dihindari lagi di sepanjang wilayah. Operasi penaklukan ICU berakhir kepada pengambilalihan teritori kembali kepada TFG, secara bersamaan juga memecah belah ICU menjadi faksi-faksi kecil. Pada akhirnya, diselenggarakan upaya

⁸ Napoleon A. Bamfo, "Ethiopia's invasion of Somalia in 2006: Motives and lessons learned," *Journal of Political Science and International Relations Vol. 4(2)*, pp 055-065, February 2010, *Academic Journal*, hlm 58

<http://www.academicjournals.org/ajpsir>

⁹ Jeffrey Gettleman, "Ethiopia Hits Somali Targets, Declaring War" *New York Times*, 25 Desember 2006, Diakses 12 November 2019

<https://www.nytimes.com/2006/12/25/world/africa/25somalia.html>

perdamaian oleh PBB pada tahun 2008 yang mengarah kepada penandatanganan perjanjian berisi gencatan senjata, pengunduran pasukan ENDF, dan penempatan pasukan perdamaian.

Salah satu pecahan ICU yang berbahaya ialah Al-Shabaab. Meski ICU berhasil dipukul mundur, kelompok ini tetap berkomitmen untuk mewujudkan Somalia yang Khalifah. Objektif Al-Shabaab sebenarnya tidak hanya meliputi pembentukan Somalia yang khalifah, namun juga menghapuskan pengaruh Barat di Tanduk Afrika, dan melakukan jihad terhadap ‘musuh-musuh Islam’, serta penghapusan bentuk-bentuk Islam lain yang bertentangan dengan untaian Salafi-Wahabi miliknya.¹⁰ Salafi-Wahabi nyata-nyata telah diperalatkan oleh Al-Shabaab untuk menciptakan transformasi sosial dengan menolak sistem struktur sosial lokal, menciptakan aliansi lintas klan, serta penyelundupan pemimpin Al-Shabaab untuk mengendalikan daerah-daerah taklukan klan yang tidak memiliki perwakilan di wilayah tersebut. Sehingga, fokus pergerakan jihad Al-Shabaab lebih mengarah ke lingkup regional dibanding global. Tidak hanya itu, organisasi ini juga mencoba untuk menjalankan fungsi negara dengan mengisi peran pemerintah sebagai penyedia layanan-layanan masyarakat seperti, mengatur pasar, memperbaiki infrastruktur, dan membangun kembali sistem judisial melalui pengadilan Syariah. Sejak saat itu, TFG berusaha untuk memerangi pasukan ofensif Al-Shabaab, secara bersamaan berupaya untuk mencabut pengaruh Islam ekstrimis di Somalia.

¹⁰ Ibid. hal 3-4

Peristiwa ini berujung ke Perang Sipil 2 di Somalia yang sampai sekarang masih belum mencapai resolusi konflik.

1.2.1 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang penulis telah paparkan, maka dapat ditarik sebuah pertanyaan penelitian, yaitu, **“Bagaimana implikasi runtuhnya rezim Siad Barre pada tahun 1991 terhadap konflik yang berkepanjangan di Somalia?”**

1.2.2 Pembatasan Masalah

Perang sipil di Somalia saat ini masih terjadi, sehingga diperlukannya pembatasan masalah guna menghasilkan suatu kajian yang komprehensif dan mendalam sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga, agar penelitian ini tetap berada dalam garis waktu yang relevan, penulis membatasi waktu kajian dengan selisih waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2006 hingga 2012. Pembatasan masalah didasarkan atas beberapa alasan. Tahun 2006 merupakan tahun saat perang sipil pertama pecah antara ICU dan TFG, sementara di tahun 2012 terjadinya pembubaran TFG sebagai pemerintah transisi di Somalia.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsekuensi dan dampak yang timbul dari *collapsed state* terhadap konflik *intra-state* yang tak kunjung usai di Somalia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menarik hubungan kausatif antara *collapsed state* dan konflik di Somalia, serta dan implikasinya terhadap masyarakat Somalia dan negara-negara tetangga Somalia di kawasan Tanduk Afrika.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah untuk menambah dan memperluas kajian dalam studi Konflik dan studi Keamanan yang secara bersamaan diharapkan dapat memperluas kajian Afrika, khususnya pada negara berkonflik. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peminat studi Keamanan dalam melakukan kajian lebih lanjut yang menyangkut topik yang diangkat.

1.4 Kajian Literatur

Penelitian ini mengkaji tiga literatur mengenai konflik di Somalia sebagai upaya untuk melihat validasi penelitian yang akan dilakukan. Penulis berharap kajian literatur yang dilakukan dapat mendukung keberhasilan penelitian ini. Literatur yang pertama ditulis oleh Afyare Abdi Elmi dan Dr Abdullahi Barise (2006) yang bertajuk *The Somali Conflict: Root causes, obstacles, and peace-*

*building strategies*¹¹. Dalam literatur ini, penulis memaparkan latar belakang penyebab konflik yang terjadi di Somalia. Penulis berargumen bahwa persaingan kekuasaan dan sumber daya, warisan kolonial dan penindasan negara ialah penyebab dari konflik yang berjangka panjang di Somalia. Penulis juga menekankan peran identitas klan, ketersediaan senjata, dan kehadiran *panglima perangs* memperburuk kondisi perang sipil di Somalia. Penulis juga berargumen bahwa politisasi identitas dilakukan oleh kelompok elit demi mengejar kekuasaan dan kepentingan ekonomi.

Untuk mengakhiri konflik, penulis menyarankan penggunaan nilai-nilai lokal dan memanggil bantuan termasuk bantuan dari pasukan penjaga perdamaian internasional, kelompok milisi lokal, pengadilan syariah dan pemimpin tradisional yang dilihat dapat membantu dalam terciptanya lingkungan yang aman di Somalia. Selain itu, komponen yang tertera dalam lembaga politik memerlukan strategi kuat yang dapat diaplikasikan dalam menangani pelanggaran HAM agar keadilan atas insiden yang telah terjadi dapat ditegakkan, sehingga membantu proses perdamaian konflik. Tak hanya itu, penulis juga berpendapat bahwa Islam dan pendidikan dapat memainkan peran dalam membangun kepercayaan di antara masyarakat Somalia. Identitas agama yang dimiliki masyarakat Somalia dilihat dapat menjadi alat pemersatu karena memiliki mekanisme nyata dalam penyelesaian konflik (secara agamis).

¹¹ Afyare Abdi Elmi dan Dr Abdullahi Barise, "The Somali Conflict: Root causes, obstacles, and peace-building strategies" di *African Security Review*, 15:1, 32-54 (2006), DOI: 10.1080/10246029.2006.9627386

Literatur kedua ditulis oleh Hassan Mudane (2018) yang bertajuk *Somalia's Protracted Conflict: the Mistrust Factor*.¹² Di dalam tulisan ini Mudane menyatakan bahwa konflik yang berkepanjangan di Somalia disebabkan oleh variabel ketidakpercayaan antara klan-klan di Somalia. Konflik politik berbasis klan di Somalia disebabkan oleh beberapa faktor, namun Mudane berargumen bahwa faktor konflik itu berevolusi dari kericuhan domestik. Dalam lingkungan politik Somalia, terdapat kecurigaan di antara klan yang sangat tinggi. Mudane mengatakan bahwa kecurigaan tersebut telah muncul saat Siad Barre menduduki pemerintahan, dimana pada saat itu ia melakukan penindasan terhadap beberapa klan tertentu (Isaaqm Hawiye, dan Majeerteen). Kecurigaan, ketidakpercayaan, dan ketakutan akan dominasi klan tertentu pun menghasilkan konsekuensi negatif seperti *security dilemma* dan *zero-sum mentality*.

Mudane kemudian menjelaskan *security dilemma* sebagai produk dari faktor ketidakpercayaan tersebut. Ia meminjam konsep *security dilemma* milik Realisme namun menempatkan aktornya kepada klan-klan di Somalia. Kondisi negara yang anarkis pada saat itu membuat kelangsungan hidup sebagai fokus utama bagi klan-klan Somalia. Setiap klan bersaing dan berjuang untuk mendapatkan kekuasaan yang dapat menjamin keamanan dan kelangsungan hidupnya. Mudane menekankan bahwa klan di Somalia dihadapi oleh situasi *self-help* yang mengharuskan mereka untuk tidak bergantung atau tidak mempercayakan keamanan klannya di tangan klan lain. *Security dilemma* pada

¹² Hassan Mudane, "Somalia's Protracted Conflict: the Mistrust Factor," ResearchGate, 2018.

akhirnya akan mengarah kepada konsep *zero-sum game* di antara klan-klan Somalia, yang kemudian akan menghambat proses pembangunan perdamaian.

Mudane juga menjelaskan mengenai peran negara lain dalam membantu proses perdamaian. Campur tangan Ethiopia dalam politik Somalia, ketidakhadiran kepentingan *major-power*, determinasi *panglima perangs* untuk mempertahankan status quo, dan kelangkaan sumber daya merupakan faktor-faktor yang menghambat terciptanya perdamaian antara konflik klan di Somalia. Namun, menurut Mudane, faktor ketidakpercayaan memainkan peran empiris dari faktor penyebab eksternal lainnya dalam menentukan keberlangsungan konflik di Somalia. Jika ketidakpercayaan tersebut tidak diatasi, maka konflik yang berkepanjangan akan sulit untuk diselesaikan. Solusi yang ditawarkan Mudane terhadap konflik di Somalia adalah dengan mempromosikan prinsip-prinsip demokratis seperti pembatasan jangka waktu, pemilihan umum secara berkala, *check and balance*, serta membangkitkan kembali hukum adat dan tradisional.

Literatur terakhir ditulis oleh J. Peter Pham (2010) yang berjudul *The Somali Solution to the Somali Crisis*¹³. Artikel ini diawali dengan memaparkan konteks sosial, politik, dan historis yang terjadi pada saat pemerintahan Somalia runtuh. Kemudian, artikel ini membahas mekanisme-mekanisme penciptaan keamanan dan stabilitas yang ditangani oleh para tetua klan, pemuka agama, dan aktor kepentingan. Terdapat beberapa kritik dalam artikel ini mengenai proses perdamaian konflik di Somalia. Yang pertama ialah, upaya perdamaian berbentuk

¹³ J. Peter Pham, "The Somali Solution to the Somali Crisis," di *Harvard Africa Journal*, Vol. 6 2009-2010, *Harvard University Press*, 2010

top-down yang berkali-kali diaplikasikan nyatanya selalu gagal dalam mencapai stabilitas politik di Somalia. Sementara, beberapa bagian di Somalia seperti Puntland dan Somaliland telah mengalami kemajuan dalam penetapan metode top-down. Kedua, pendekatan yang dilakukan dalam upaya perdamaian selama ini hanya berfokus pada negara dan mengabaikan peran-peran yang dimiliki komponen masyarakat Somalia dalam penyelesaian konflik. Sehingga, solusi yang ditawarkan artikel ini dalam rekonsiliasi konflik ialah dengan menekankan pendekatan bottom-up. Dengan demikian, masyarakat Somalia diberikan waktu dan keleluasaan dalam mendeterminasikan susunan politik di masa depan, dan pada saat yang bersamaan juga memberikan kesempatan pada negara tetangga dan komunitas internasional untuk melindungi kepentingan keamanan mereka.

Ketiga literatur membahas mengenai alasan dibalik konflik yang berkepanjangan di Somalia. Literatur yang pertama menekankan faktor-faktor seperti warisan kolonial, peran identitas dan kelompok elit dalam konflik di Somalia. Literatur kedua menekankan bahwa faktor ketidakpercayaan dapat menjadi variabel yang kuat dalam menjelaskan konflik yang terjadi di Somalia. Sementara, literatur yang ketiga mengaitkan hubungan kausal antara kondisi historis, politik, dan sosial dalam konflik yang berkepanjangan di Somalia. Persamaan dari ketiga literatur tersebut ialah ketiganya membahas mengenai alasan dibalik konflik yang berkepanjangan di Somalia serta secara implisit menekankan tentang implikasi yang ditimbulkannya. Ketiga literatur juga menyediakan solusi-solusi yang dapat diterapkan Somalia dalam penyelesaian konflik sehingga dapat menciptakan perdamaian. Ketiganya memberikan perspektif yang berbeda terhadap

konflik yang terjadi di Somalia, pada saat yang bersamaan memberikan pandangan baru yang dapat dikaji dalam penelitian ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Protracted Social Conflict Theory adalah teori yang diusung oleh Edward Azar yang dapat didefinisikan sebagai konflik sosial yang terjadi saat masyarakat kehilangan kepuasan dari kebutuhan dasar mereka berdasarkan identitas komunal. Kehilangan kepuasan tersebut merupakan hasil dari rantai sebab akibat yang secara kompleks melibatkan peran negara dan pola hubungan internasional. Dalam teori ini, faktor seperti warisan kolonial, latar belakang sejarah, dan sifat multi-komunal masyarakat memegang peran penting dalam membentuk dinamika konflik sosial. Adapun aktor yang dirujuk dalam teori ini ialah satu kelompok dalam satu negara-bangsa atau di negara-bangsa yang berbeda di wilayah yang sama, yang juga melibatkan peran identitas (seperti ras, etnis, dan agama). Teori ini menekankan bahwa konflik berakar pada perpecahan atau perselisihan etnis yang dapat mengintensifkan perselisihan domestik maupun internasional¹⁴. Teori ini dapat dibedakan dengan teori konflik lain karena teori ini menitikberatkan pada identitas kelompok dan nasional serta hak dan hak istimewa yang terkait dengannya¹⁵.

¹⁴ Edward Azar dan Nadia Farah, "The Structure of Inequalities and Protracted Social Conflict: A Theoretical Framework," di *International Interactions*, Vol. 7, No. 4, pp. 317-335, *Gordon and Breach, Science Publishers, Inc.* (1981), hlm 319-320

¹⁵ Chung In Moon dan Edward Azar, "Managing Protracted Social Conflict in the Third World: Facilitation and Development Diplomacy," di *Millenium: Journal of International Studies* Vol. 15, No. 3 (1986), hlm 395

Edward Azar membagi *Protracted Social Conflict Theory* (PSCT) ke dalam tiga fase kunci, *Genesis*, *Process Dynamics*, dan *Outcome Analysis*.

1. *Genesis*

Genesis atau Pre-kondisi merujuk kepada beberapa kondisi yang melatarbelakangi perubahan situasi dari yang sifatnya non-konflik menjadi situasi berkonflik. Adapun pre-kondisi yang dimaksud merujuk kepada empat karakteristik, yaitu:

- *Communal Content*

Communal Content memainkan variabel yang paling signifikan dalam PSCT karena bentuk masyarakat yang garisbawahi dalam PSCT ialah masyarakat yang memiliki komposisi multi-komunal. Potensi konflik sangat sering muncul di dalam sebuah masyarakat yang heterogen, yang memiliki konten komunal seperti kelompok identitas tertentu. Dalam kata lain, masyarakat multi-komunal (baik yang terbentuk dari konsekuensi kekuatan kolonial ataupun melalui persaingan historis) seringkali memunculkan dominasi satu kelompok di antara kelompok-kelompok lain. Biasanya, negara didominasi oleh satu kelompok komunal atau sebuah koalisi dari beberapa kelompok komunal yang tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok lain di masyarakat. Hal itulah yang menjadi sumber konflik, yaitu saat munculnya sebuah kondisi yang terdapat kelompok lain (yang tidak mendominasi)

yang merasa tidak mendapat perlakuan adil akibat adanya dominasi dari kelompok lain¹⁶.

- *Human Needs*

Kelangsungan hidup individu atau masyarakat bergantung pada kepuasan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam sebuah negara yang memiliki beragam kelompok identitas, sangat dimungkinkan terdapat satu kelompok yang mendominasi pemerintahan. Berangkat dari hal tersebut, dapat terjadi penggunaan kekuasaan yang cenderung lebih mementingkan atau mengutamakan kelompok identitas tertentu yang menyebabkan kelompok tersebut dapat menikmati keuntungan dari pemenuhan kebutuhan yang didapatnya. Kekecewaan atau keluhan terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan dasar itulah yang biasanya diungkapkan secara kolektif. Sehingga, Azar menyatakan bahwa kegagalan dalam menangani keluhan-keluhan tersebut dapat menjadi celah dalam munculnya konflik yang berkepanjangan.¹⁷ Poin ini banyak dikutip oleh Azar dari teori yang diusung John Burton dalam karyanya, *Conflict: Human Needs Theory* (1990).¹⁸

- *Government and State's Role*

Pemerintah merupakan pra-syarat terbentuknya sebuah negara. Pemerintah memiliki wewenang untuk memerintah, mengatur, dan melindungi warga negara. Peran pemerintah merupakan faktor yang krusial dalam pemenuhan kebutuhan

¹⁶ Oliver Ramsbotham, "The analysis of protracted social conflict: a tribute to Edward Azar," di dalam *Review of International Studies* (2005), 31, 109–126, *British International Studies Association*, hlm 114-115

¹⁷ Ibid, hlm 115

¹⁸ John Burton, *Conflict: Human Needs Theory*, (Basingstoke: Macmillan, 1990)

individu dan kelompok identitas. Azar menekankan bahwa biasanya negara yang pemerintahan yang tidak kompeten, parokial, rapuh dan otoriter, merupakan negara yang di dalamnya terjadi konflik sosial berkepanjangan. Hal tersebut diakibatkan karena frustrasi individu maupun kelompok identitas dari kegagalan negara dalam menjalankan perannya sebagai pemenuh kebutuhan¹⁹.

Azar juga menekankan pada beberapa poin yang perlu digarisbawahi mengenai peran pemerintah dan konflik berkepanjangan. Terdapat sebuah pernyataan dari teori Liberal, *'state is an aggregate of individuals entrusted to govern effectively and to act as an impartial arbiter of conflicts among the constituent parts.'* Hal ini merujuk kepada pernyataan bahwasanya negara diharapkan memperlakukan semua warga negaranya secara adil sesuai dan sederajat dengan hukum yang berlaku. Namun, nyatanya yang terjadi di beberapa negara ialah bahwa otoritas politik cenderung dimonopoli oleh kelompok identitas yang dominan atau kelompok-kelompok hegemon yang menggunakan negara sebagai alat untuk memaksimalkan kepentingan mereka, yang biasanya bersifat merugikan orang lain ataupun kelompok lain. Hal ini biasanya berbentuk kepentingan kelompok tertentu yang dimobilisasi oleh pihak elite yang dominan, yang mencakup pembatasan akses terhadap kelompok minoritas. Maka dari itu, tipe rezim dan tingkat legitimasi dinilai sebagai variabel yang memiliki keterkaitan penting antara kebutuhan dan konflik sosial berkepanjangan²⁰.

¹⁹ Ibid, hlm 116

²⁰ Ibid

Selain itu, PSC cenderung berpusat di negara-negara berkembang yang biasanya ditandai dengan karakteristik seperti pertumbuhan populasi yang cepat dan persediaan sumber daya yang terbatas. Azar juga mengidentifikasi karakteristik negara yang memiliki otoritas politik yang terbatas *'In most protracted social conflict-laden countries, political capacity is limited by a rigid or fragile authority structure which prevents the state from responding to, and meeting, the needs of various constituents.'*²¹

- *International Linkages*

Dalam variabel ini, Azar kepada dua poin yaitu ketergantungan ekonomi (economic dependency) dan hubungan klien (client relationship). Eskalasi konflik yang berkepanjangan dapat dipengaruhi oleh kondisi tatanan politik internasional terlebih lagi jika negara yang didalamnya mengalami konflik, merupakan negara yang secara ekonomi dan politik sangat bergantung dengan negara-negara lain. Dalam kata lain, otonomi negara akan melemah karena negara diharuskan untuk mengejar kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan pola sistem internasional, yang biasanya kontradiktif dengan kebutuhan masyarakat komunal. Azar menyatakan bahwa,

*"Moreover, dependency often exacerbates denial of the access needs of communal groups, distorting the domestic political and economic systems through the realignment of subtle coalitions of international capital, domestic capital and the state. Client relationships, referring to arrangements whereby a states security is guaranteed in return for loyalty can be equally significant with governments potentially distracted from their key responsibilities."*²²

²¹ Ibid

²² Ibid

2. *Process Dynamics*

Terpenuhinya pre-kondisi tidak semata-mata menjadikan sebuah konflik disebut sebagai PSC. Konflik sosial berkepanjangan memiliki poin-poin pemicu yang bergerak sebagai proses dalam mengubah konflik yang sebelumnya tidak terlihat menjadi lebih jelas (*latent phase to overt phase*). Adapun poin pemicu dalam dinamika proses sebuah konflik ialah:

- *Communal Action and Strategies*

Poin ini berperan dalam mengundang unsur kekerasan dalam konflik yang tadinya masih berada dalam fase *latent* (belum terlihat). Proses ini dijelaskan oleh Edward Azar, saat terdapat sebuah peristiwa yang menyebabkan *individual victimization* dikenal atau diakui secara kolektif. Pengakuan *individual grievances* secara kolektif tersebut kemudian dapat mengarah ke protes kolektif, yang biasanya diikuti oleh penekanan balik oleh pihak lawan. Saat ketegangan makin meningkat, korban komunal biasanya menjadikan momentum tersebut untuk mengatur dan memobilisasikan sumber daya. Jika kekuatan kelompok komunal ataupun mobilisasi mulai menguat, biasanya kelompok tersebut akan menentukan dan mengatur taktik dan strategi yang lebih luas, hal ini dapat mengarah kepada gerakan gerilya ataupun gerakan pemisahan.

- *State Action and Strategies*

Edward Azar menjelaskan bahwa mayoritas dari kasus-kasus konflik sosial berkepanjangan dalam konteks aksi dan strategi yang dibawa dari kelompok

komunal biasanya akan dibalas dengan penindasan secara koersif dari negara, terlebih lagi jika negara tersebut memiliki pemerintahan yang lemah. Respon ofensif dari negara dilakukan karena adanya keinginan untuk tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dari pemerintah. Penggunaan instrumen kekerasan (militer) oleh negara merupakan strategi utama dalam mengatasi protes dari kelompok komunal. Berangkat dari hal ini, hanya wajar jika kelompok komunal membalas aksi negara dengan respon yang relatif sama.

- *Built in Mechanism of Conflict*

Poin terakhir dalam dinamika proses konflik lebih menjelaskan mengenai dampak jangka panjang mengenai persepsi dari pihak-pihak berkonflik antara satu dengan yang lain. Alhasil, persepsi tersebut dapat memengaruhi tingkah laku pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik sosial berkepanjangan. Sehingga, mispersepsi, stereotype, serta polarisasi yang berasal dari pihak berkonflik terhadap satu dan lainnya, tidak hanya merupakan produk, tetapi juga hasil dari variabel yang telah dijelaskan sebelumnya (aksi dari kelompok komunal dan negara). Jika hadirnya mispersepsi, maka konsekuensi yang ditimbulkannya hanya akan mengarah ke pelanggaran konflik²³.

3. *Outcome Analysis*

Adapun implikasi dari konflik sosial berkepanjangan ialah hasil yang sifatnya *negative-sum* yang biasanya tidak terdapat akhir yang jelas ataupun

²³ Evagoras C. Leventis dan Andreas Tsokkalides, "Protracted Social Conflict Analysis and Cyprus: AN Assessment," *The Cyprus Review* 19:2 (2007), hlm 41

‘pemenang yang pasti,’ terlebih lagi tidak memungkinkan terciptanya sebuah solusi untuk mengatasi konflik²⁴. Edward Azar menyebutkan empat implikasi yang dapat dilihat jelas dari konflik sosial berkepanjangan, yaitu:

- *Deterioration of physical security*

Edward Azar menyebutkan bahwa kemunduran terhadap keamanan fisik merupakan konsekuensi yang paling jelas dalam konflik berkepanjangan. Adanya kemunduran terhadap keamanan fisik suatu negara biasanya juga melibatkan kemunduran ekonomi, yang ditandai dengan hilangnya sumber daya bagi semua konstituen yang ada dalam mendapatkan kebutuhan dasar mereka, sehingga, hal ini kemudian berperan sebagai variable yang melanggengkan konflik. Kemunduran terhadap keamanan fisik dapat berarti kemunduran terhadap keamanan nasional suatu negara yang berhubungan dengan pertahanan fisik, berbentuk sebagai contoh, agresi militer dari aktor negara maupun non-negara²⁵.

- *Institutional Deformity*

Dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial berkepanjangan ialah kerusakan pada institusi sosial, ekonomi, dan politik, yang kemudian dapat meningkatkan keberlanjutan dari konflik. Variabel ini dijelaskan sebagai penyebab dan dampak dari keberlangsungan dan keberlanjutan konflik²⁶.

- *Psychological Ossification*

²⁴ Ibid, hlm 43

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid, hlm 44

Poin ini merupakan dampak dari proses interaksi kognitif antara pihak-pihak berkonflik mengenai persepsi yang terproyeksikan tentang satu dengan yang lainnya, yang sebelumnya telah dijelaskan dalam dinamika proses konflik. Dampak ini menekankan bahwa adanya unsur psikologis yang berperan dalam melanggengkan sebuah konflik²⁷.

- *Increased Dependency and Cliency*

Dampak terakhir dari konflik sosial berkepanjangan merupakan peningkatan terhadap ketergantungan sebuah negara terhadap dukungan eksternal, yang kemudian menghadirkan peran pihak ketiga dalam pengambilan keputusan. Sehingga, adapun dampak dari kehadiran pihak eksternal tersebut terhadap masyarakat ialah hilangnya akses maupun kendali dalam kehidupan sehari-harinya²⁸.

1.6 Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metoda Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metoda kualitatif. Adapaun pengertian metoda deskriptif menurut Moh. Nazir (1988) ialah, suatu metoda yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang

²⁷ Ibid, hlm 45

²⁸ Ibid, hlm 48

diselidiki.²⁹ Menurut John Creswell (2007), penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi, pandangan dunia, dan penggunaan kerangka teoritis dalam meneliti suatu permasalahan penelitian yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Salah satu karakteristik dari metoda kualitatif ialah peneliti merupakan instrumen kunci, yang diartikan bahwa peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengobservasi beragam sumber data, seperti interview, observasi langsung, dan studi literatur³⁰.

Dalam metoda kualitatif, terdapat lima pendekatan penelitian yaitu; penelitian deskriptif, penelitian fenomenologis, penelitian grounded theory, penelitian etnografi, dan penelitian studi kasus³¹. Penulis akan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dalam penelitian ini guna memaparkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi pasca runtuhnya rezim Siad Barre di Somalia sehingga penulis dapat menarik hubungan antara fenomena dan kerangka pemikiran yang digunakan. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data melalui studi literatur.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengkajian berbasis literatur dan internet sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Literatur yang didapatkan secara *online* maupun *offline* akan menjadi sumber data bagi penulis dalam melakukan penelitian. Adapun literatur yang digunakan penulis ialah buku, jurnal

²⁹ Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Surabaya:Ghalia Indonesia, 1988), hlm 63

³⁰ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, (Sage Publications, 2007), hlm 34-39

³¹ *Ibid*, hlm 74

ilmiah, artikel ilmiah, laporan, artikel berita, serta data-data lain yang terpercaya yang dapat mendukung keberlangsungan penelitian ini³².

1.7 Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab I dituliskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metoda penelitian, sistematika pembahasan, dan linimasa penelitian.

BAB II: SOMALIA SEBAGAI *COLLAPSED STATE*

Dalam bab II disinggung sedikit mengenai gaya kepemimpinan Siad Barre hingga kepergiannya pada tahun 1991, dan kondisi negara pasca kekosongan pemerintah.

BAB III: KONFLIK BERKEPANJANGAN DI SOMALIA

Bab III merupakan jantung dari penelitian yang menjelaskan Perang Sipil 1 dan Perang Sipil 2 di Somalia dengan menggunakan kerangka pemikiran sebagai pisau analisa.

BAB IV: KESIMPULAN

³² Sharan B. Merriam, *Qualitative research: a guide to design and implementation*, (San Fransisco: John Wiley & Sons, 2009), hlm 140-158

Dalam bab IV dituliskan jawaban dari pertanyaan riset penelitian dengan menyimpulkan dari data-data yang telah disediakan dan analisa yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya.